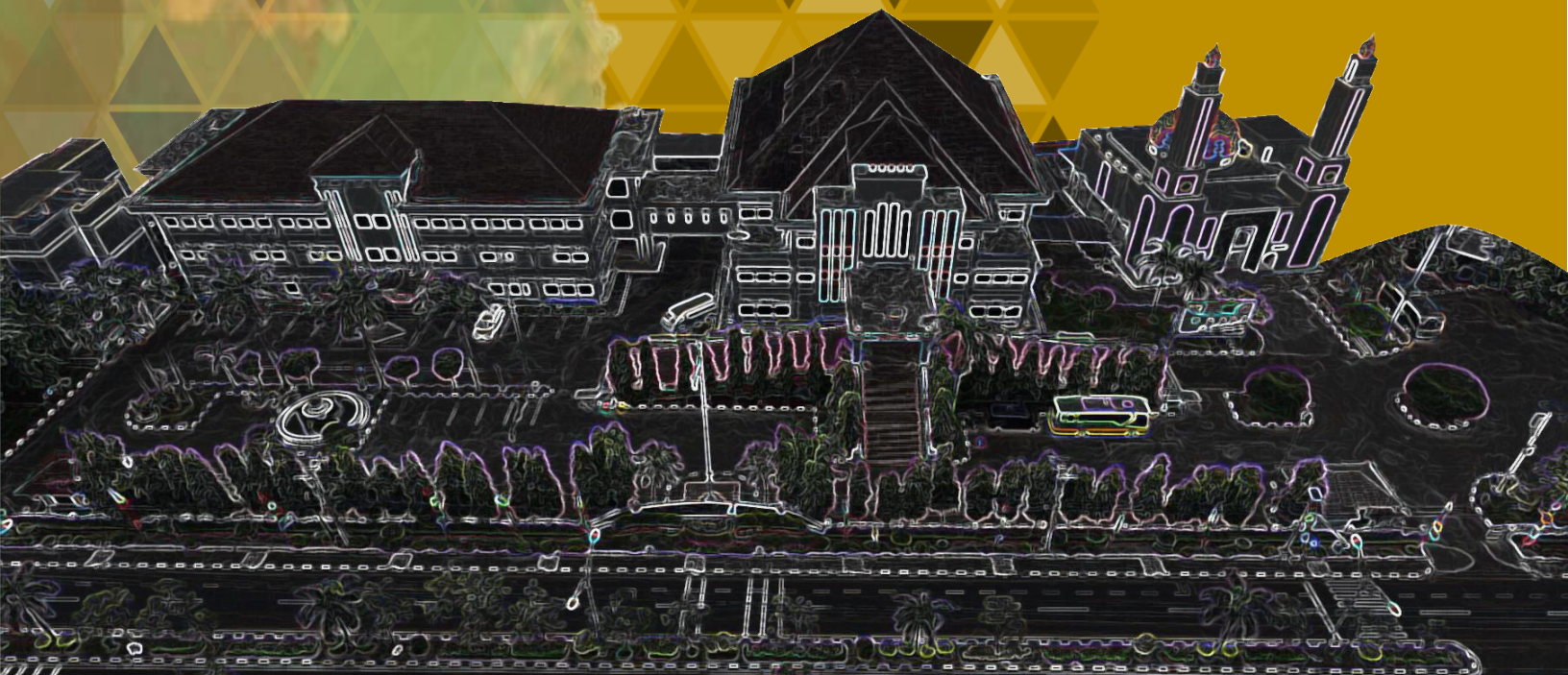




**RENCANA KERJA
(RENJA)
SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI
TAHUN 2026**




KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tahun 2026 dapat disusun. Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang membuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2026. Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam mencapai tujuan organisasi, serta arahan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dalam suatu pola sikap dan tindak.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa emberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Bekasi, 15 Agustus 2025
Sekretaris DPRD Kota Bekasi



Lia Erliani, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19730606 199311

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK & CHART	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi	12
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu	12
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 s/d Triwulan II.....	27
2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	37
2.2.1 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024	37
2.2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 s/d Triwulan II	58
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	60
2.4. <i>Review</i> terhadap Ranwal RKPD Tahun 2026.....	65
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	78
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI	79
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	79
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	86
3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi ...	90

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI 104
BAB V PENUTUP 110

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan).....	14
Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi s/d Triwulan I Tahun 2025	28
Tabel 2. 3 Perbandingan Capaian IKU dengan Renstra	37
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja AKIP Tahun 2024	54
Tabel 2. 5 Penilaian Komponen AKIP Perangkat Daerah	55
Tabel 2. 7 Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2026	66
Tabel 3. 1 Tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	86
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi	88
Tabel 3. 3 Tabel T-C.33 Rumusan Rankhir Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	91
Tabel 4. 1 Rencana Kinerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD	79
Gambar 3. 2 Visi Kabinet Merah Putih	81
Gambar 3. 3 8 (delapan) Misi Utama Asta Cita	81
Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi .	100

DAFTAR GRAFIK & CHART

Grafik 2. 1 Pagu Murni dan Pagu Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024	25
Grafik 2. 2 Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024	26
Grafik 2. 3 Pagu Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.....	36
Grafik 2. 4 Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian "Prosentase Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda Tepat Waktu" Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun	40
Grafik 2. 5 Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian "Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu" Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022	45
Grafik 2. 6 Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian "Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu" Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022.....	52
Grafik 2. 7 Perbandingan Antara Realisasi "Nilai AKIP Perangkat Daerah" Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022.....	55
Chart 2. 1 Realisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.....	36
Chart 3. 1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	101
Chart 3. 2 Formasi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	102
Chart 3. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingket Eselon	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan. Dalam menyusun dokumen RKPD, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2025-2029, dimana pada Renja memuat Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun berjalan, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menjalankan Program dan Keegiatannya guna mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya didalam Renstra dan bahan evaluasi pencapaian Tujuan dan Sasaran dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi, program/kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan dan tujuan Pemerintah Kota Bekasi yang tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029.

Pada tahun berjalan 2025, seiring dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara serentak, maka terdapat perubahan terhadap dokumen perencanaan. Berdasarkan Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/1053/Bappelitbangda.AP4EP tanggal 24 Pebruari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Sudat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Pebruari 2025 tentang Penyesuaian Arah kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dan surat edaran Wakil Wali Kota Bekasi nomor: 000.7.2.4/1097/ Bappelitbangda.AP4EP tanggal 26 Februari 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bekasi Tahun 2026 serta surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/2519.1/ Bappelitbangda.AP4EP tanggal 12 Juni 2025 hal Pelaksanaan Desk Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

- Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 16A Seri E);

22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 21 Seri E)
23. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 100 Seri D).
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2028;
27. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencan Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 dimaksudkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi nomor: 000.7.2.4/1097/Bappelitbangda.AP4EP tanggal 26 Februari 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bekasi Tahun 2026 dan sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang memuat :

1. Mengevaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dan menjadi acuan bagi Seluruh kegiatan

- perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit di lingkungan Sekretariat DPRD kota Bekasi;
2. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;
 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
 4. Memberikan gambaran kemampuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tujuan serta sasaran dalam mencapai Misi dan mewujudkan Visi Kota Bekasi;
 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.
 6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rankhir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026; dan
 7. Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pejabat/Pimpinan instansi.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2026.
2. Menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Bekasi tahun 2026.
3. Mengoperasionalkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rankhir Sekrtariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Sekretariat DPRD sudah disahkan dan pencapaian Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka penyampaian kinerja pembangunan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan penjelasan apabila ada

temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya namun indikatornya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini berisikan usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dirumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Renstra Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (misal: pencapaian visi dan misi kepala daerah);
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain: jumlah program, dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebelumnya, maka dilakukan pengukuran dan Evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan cara menghitung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Kegiatan reviu hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 (n-2) tidak dilakukan karena menggunakan Renstra 2024-2026.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan, dengan anggaran murni sebesar Rp. 200.502.786.458,- (Dua Ratus Miliar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang kemudian pada anggaran perubahan melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan, menjadi Rp. 209.165.099.233,- (Dua Ratus Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 8.662.312.775,- (Delapan Miliar Enam ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2. 1
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DPRD Kabupaten/Kota	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	100%		100%	94.82%	94.82%	100%	40,9%	40,9%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	45,8%	45,8%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dok	-	12	12	100.00	12	3	25
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	-	3	3	100.00	3	2	66,67
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	96.62%	96.62%	100%	54,7%	54,7%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55 Org/Bln	-	770	718	93.25	2086	642	30,78
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	-	2	2	100.00	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanam/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanam/ Semesteran SKPD	15 Lap	-	-	-	-	15	5	33,33
		Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD								
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	-	-	-	-
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	100%		100%	100%	100%	100%	15,5%	15,5%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	15,5%	15,5%
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	14 Org	-	14	14	100.00	52	2	3,85
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53 Org	-	48	48	100.00	48	13	27,08
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	56,9%	56,9%
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1	1	100.00	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	4	4	100.00	4	3	75
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	-	3	3	100.00	3	2	66,67
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65.600 Dok	-	4	4	100.00	4	0	0
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.990 Lap	-	12	12	100.00	12	6	50
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.025 Lap	-	12	12	100.00	12	6	50
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	100%		100%	90.91%	90.91%	100%	13,6%	13,6%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	90.91%	90.91%	100%	13,6%	13,6%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	220 Unit	-	220	200	90.91	220	30	13,64
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	100%		100%	94.41%	94.41%	100%	30,9%	30,9%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	94.41%	94.41%	100%	30,9%	30,9%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	539 Lap	-	566	556	98.23	566	6	1,06
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	-	36	36	100.00	36	18	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	-	12	12	100.00	12	5	41,67
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	100%		100%	80%	80%	100%	44,7%	44,7%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	80%	80%	100%	44,7%	44,7%
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	-	1	1	100.00	1	0	0
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	-	33	33	100.00	33	15	45,45
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Unit	-	100	0	0.00	100	100	100
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	-	177	177	100.00	177	50	28,25
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-	4	4	100.00	4	2	50
		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	100%		100%	89.33%	89.33%	100%	18%	18%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%		100%	89.33%	89.33%	100%	18%	18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Org /Bln	-	650	637	98.00	650	350	53,85
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	-	7	7	100.00	6	0	0
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Org	-	50	35	70.00	50	0	0
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	100%		100%	100%	100%	100%		
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	42 Lap	-	12	12	100.00	12	-	-
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
		Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda	100%		100%	85.71%	85.71%	100%	30,6%	30,6%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%		100%	85.71%	85.71%	100%	16%	16%
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dok	-	2	2	100.00	2	1	50
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dok	-	10	10	100.00	10	1	10
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dok	-	12	12	100.00	10	2	20
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	10 Dok	-	7	2	28.57	7	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dok	-	1	1	100.00	1	0	0
		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	100%		100%	100%	100%	100%	0%	0%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%		100%	100%	100%	100%	0%	0%
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	-	1	1	100.00	1	0	0
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	-	1	1	100.00	1	0	0
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	-	1	1	100.00	1	0	0
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	-	1	1	100.00	1	0	0
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dok	-	1	1	100.00	1	0	0
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	-	1	1	100.00	1	0	0
		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD	100%		100%	100%	100%	100%	42,9%	42,9%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Dokumen dan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%		100%	100%	100%	100%	42,9%	42,9%
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14 Lap	-	12	12	100.00	12	6	50
4.02.02.2.03.02	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14 Lap	-	12	12	100.00	12	6	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.02.2.03.03	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	14 Lap	-	12	12	100.00	12	6	50
4.02.02.2.03.04	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14 Lap	-	12	12	100.00	12	6	50
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dok	-	1	1	100.00	1	0	0
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dok	-	1	1	100.00	1	0	0
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dok	-	1	1	100.00	1	1	100
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%		100%	100%	100%	100%	33,7%	33,7%
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	1	1	100.00	-	-	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	14 Dok	-	6	6	100.00	6	1	16,67
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	204 Org	-	204	204	100.00	210	23	10,95
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	54 Org	-	54	54	100.00	54	31	57,41
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	52 Dok	-	12	12	100.00	12	6	50
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dok	-	3	3	100.00	3	1	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%		100%	100%	100%	100%	66,7%	66,7%
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Lap	-	3	3	100.00	3	2	66,67
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	3 Dok	-	3	3	100.00	3	2	66,67
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	-	2	2	100.00	3	2	66,67
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Lap	-	12	12	100.00	12	6	50
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Fasilitasi Tugas DPRD	100%		100%	100%	100%	100%	37,5%	37,5%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dok	-	5	5	100.00	12	0	0
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	3 Lap	-	1	1	100.00	1	1	100
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dok	-	12	12	100.00	12	6	50
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	36 Dok	-	3	3	100.00	3	0	0

Catatan : Data disesuaikan dengan target Renstra 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian kinerja n-2 (2024), adapaun capaian kinerja n-3 (2023) tidak disajikan karena Renstra yang digunakan adalah Renstra 2024-2026. Melalui tabel tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100% (Berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024) adalah:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian adalah 96.62%. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD bersifat situasional dan menyesuaikan kebutuhan, yaitu yang dalam pencapaian target berfokus pada jumlah orang yang menerima gaji atau tunjangan;
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian adalah 90.91%;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian adalah 99.41%. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bersifat situasional dengan jumlah surat menyurat terkirim.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian kinerja 80%. Tidak tercapainya kinerja karena pada Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya hanya teralisasi 200 unit dari 220 unit. Hal ini dikarenakan terkendala terkait pengadaan dan distribusi barang;
 - e. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, capaian adalah 89.33%. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel tidak dilaksanakan karena masih dilaksankannya proses renovasi gedung Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD tidak mencapai target kinerja dikarenakan sebagian

dewan telah melakukan medical check up secara mandiri sebagai syarat calon legislatif.

- f. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, capaian adalah 85.71%. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik hanya terealisasi 28,57% yaitu dengan tersampainya usulan raperda inisiatif DPRD Kota Bekasi Tahun 2024.
2. Program/kegiatan/sub. Kegiatan yang capaian kinerjanya mencapai 100% adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.
 3. Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi 100% adalah tidak ada.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan adalah:
 - a. Belum optimalnya pengendalian, dan kurangnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) perangkat daerah sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU secara berjenjang.
 - b. Belum memudahinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan, yang belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.

Indikasi:

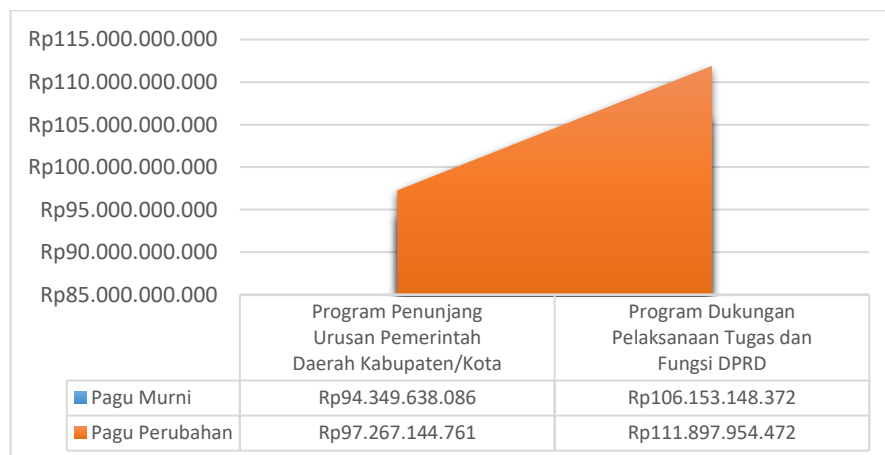
 - Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal perencanaan, contohnya: target kegiatan

- dapat dievaluasi dan disesuaikan pada saat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka pencapaian target kinerja dan pencapaian target IKU.
- Pelaporan pada Aplikasi Simpelbang dan Aplikasi Monev yang belum tepat syarat dan tepat waktu.
- c. Rendahnya kualitas data dan informasi, diakibatkan pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah tidak dapat tercapainya target keempat indikator program tersebut di atas, yang dikhawatirkan berpengaruh juga terhadap pencapaian indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”.
 6. Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU;
 - c. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, untuk mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga memahami tata cara proses pelaporan dan monev, sehingga kinerja dapat diukur.

- d. Meningkatkan kualitas data dan informasi, sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat, sebagai dasar pengolahan data, perumusan analisis, dan rekomendasi.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 melaksanakan kegiatannya didukung anggaran dengan anggaran murni sebesar Rp. 200.502.786.458,- (Dua Ratus Miliar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribuan Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang kemudian pada anggaran perubahan menjadi Rp. 209.165.099.233,- (Dua Ratus Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Grafik 2. 1
Pagu Murni dan Pagu Perubahan Sekretariat DPRD
Kota Bekasi Tahun 2024

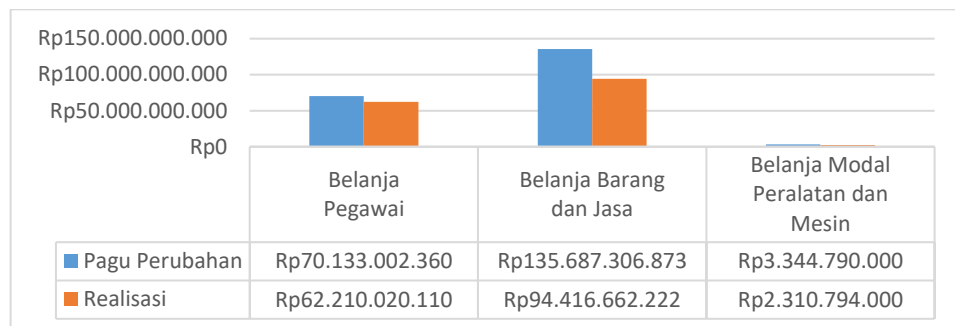


Sumber: SIPD Kota Bekasi, 2024

Berdasarkan grafik di atas, terdapat penambahan anggaran pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebesar Rp. 8.662.312.775,- (Delapan Miliar Enam ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sebagai sarana pendukung Fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD tahun 2024.

Adapun realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2. 2
Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV
Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024



Sumber: SIPD Kota Bekasi, 2024 (data diolah)

1. Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 70.133.002.360,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.210.020.110,-, sehingga persentase capaian sebesar 88.70% dari total anggaran perubahan tahun 2024.
2. Belanja Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp. 135.687.306.873,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.416.662.222,-, sehingga persentase capaian sebesar 69.58% dari total anggaran perubahan tahun 2024.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan sebesar Rp. 3.344.790.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.310.794.000,-, sehingga persentase capaian sebesar 69.09% dari total anggaran perubahan tahun 2024.

Sampai dengan akhir tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Bekasi merealisasikan anggaran sebesar Rp. 158.937.476.332,- atau sebesar 75.99%. Tidak terserapnya anggaran sebesar 24.01% dikarenakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan berdasarkan kebutuhan, sehingga terdapat efisiensi anggaran, dan adanya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024 terkait Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, serta Surat Wali Kota Bekasi Nomor : 900.1.15.1/5686/SETDA.Bang tentang pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berpengaruh pada penyerapan anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, rata-rata capaian kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 **“Sangat Tinggi”** dengan nilai 100%, capaian program **“Sangat Tinggi”** dengan nilai 97.77%, sehingga rata-rata capaian kinerja dari seluruh program adalah 96.12% dengan predikat **“Sangat Tinggi”**, dan capaian anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 75.99%.

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 s/d Triwulan II

Adapun Evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Sekrtaetariat DPRD Kota Bekasi s/d Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		%	100	35,27	35,3	232.840.644.843,00	66.310.340.089,00	28,5
		SEKRETARIAT DPRD		%	100	35,27	35,3	232.840.644.843,00	66.310.340.089,00	28,5
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	40,86	40,9	111.480.241.704,00	40.935.564.283,00	36,7
			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		%	100	45,83	45,8	80.000.000,00	4.236.000,00	5,3
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	3	25	40.000.000,00	4.236.000,00	10,59
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	2	66,67	40.000.000,00	0	0
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		%	100	54,7	54,7	15.063.367.000,00	6.038.907.118,00	40,1
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2086	642	30,78	14.999.367.000,00	6.029.386.618,00	40,2
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100	40.000.000,00	9.520.500,00	23,8

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	5	33,33	24.000.000,00	0	0
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	15,46	15,5	951.170.000,00	54.291.600,00	5,71
6		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	52	2	3,85	379.170.000,00	2.101.000,00	0,55
7		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	48	13	27,08	572.000.000,00	52.190.600,00	9,12
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	100	56,94	56,9	6.679.329.562,00	1.331.941.500,00	19,9
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	150.000.000,00	0	0
9		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	3	75	2.937.763.000,00	626.566.500,00	21,33
10		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2	66,67	459.116.562,00	54.100.000,00	11,78
11		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	0	580.000.000,00	0	0
12		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6	50	1.552.450.000,00	410.850.000,00	26,46

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6	50	1.000.000.000,00	240.425.000,00	24,04
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	13,64	13,6	1.200.000.000,00	0	0
14		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	220	30	13,64	1.200.000.000,00	0	0
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	30,91	30,9	6.365.183.760,00	2.746.108.392,00	43,1
15		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	566	6	1,06	25.000.000,00	974.000,00	3,9
16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	18	50	1.200.000.000,00	551.618.396,00	45,97
17		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5	41,67	5.140.183.760,00	2.193.515.996,00	42,67
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	44,74	44,7	8.562.000.000,00	2.325.073.149,00	27,2
18		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	120.000.000,00	0	0

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	15	45,45	510.000.000,00	35.179.359,00	6,9
20		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	100	100	100.000.000,00	99.960.000,00	99,96
21		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	177	50	28,25	832.000.000,00	0	0
22		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2	50	7.000.000.000,00	2.189.933.790,00	31,28
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		%	100	17,95	18	71.579.191.382,00	28.286.660.744,00	39,5
23		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	650	350	53,85	70.644.191.382,00	28.286.660.744,00	40,04
24		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	6	0	0	770.000.000,00	0	0
25		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	0	0	165.000.000,00	0	0
		Layanan Administrasi DPRD		%	100	50	50	1.000.000.000,00	148.345.780,00	14,8
26		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	6	50	1.000.000.000,00	148.345.780,00	14,83
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terasilinasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100	30,59	30,6	121.360.403.139,00	25.374.775.806,00	20,9
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		%	100	16	16	21.102.373.000,00	1.511.262.649,00	7,16
27		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	2	1	50	1.450.000.000,00	196.264.038,00	13,54

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	10	1	10	9.104.205.000,00	487.691.680,00	5,36
29		Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	10	2	20	4.135.068.000,00	812.306.931,00	19,64
30		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	7	0	0	5.822.010.000,00	0	0
31		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	0	0	591.090.000,00	15.000.000,00	2,54
			Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100					
		Pembahasan Kebijakan Anggaran		%	100	0	0	7.586.420.000,00	0	0
32		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	0	0	2.000.000.000,00	0	0
33		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	0	0	1.500.000.000,00	0	0
34		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	0	0	735.000.000,00	0	0
35		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	0	0	1.116.420.000,00	0	0
36		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	0	0	735.000.000,00	0	0
37		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	0	0	1.500.000.000,00	0	0
			Persentase Terasilinasinya kegiatan DPRD	%	100					

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		%	100	42,86	42,9	33.727.514.928,00	7.852.652.464,00	23,3
38		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	6	50	5.111.670.264,00	1.383.309.010,00	27,06
39		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	6	50	5.111.670.264,00	1.343.571.474,00	26,28
40		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	6	50	5.111.670.264,00	1.282.488.893,00	25,09
41		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	6	50	5.111.670.264,00	1.169.110.518,00	22,87
42		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	0	0	1.700.000.000,00	0	0
43		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	0	0	9.000.000.000,00	2.092.952.674,00	23,26
44		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	100	2.580.833.872,00	581.219.895,00	22,52
		Peningkatan Kapasitas DPRD		%	100	33,67	33,7	22.932.439.000,00	4.172.818.426,00	18,2
45		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	1	16,67	5.834.827.000,00	1.445.587.102,00	24,78
46		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	210	23	10,95	2.341.612.000,00	189.200.000,00	8,08
47		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	54	31	57,41	756.000.000,00	300.000.000,00	39,68

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	%	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	6	50	12.000.000.000,00	2.044.210.264,00	17,04
49		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	3	1	33,33	2.000.000.000,00	193.821.060,00	9,69
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD	%	100	66,67	66,7	12.926.007.500,00	7.498.597.700,00	58
50		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	3	2	66,67	284.182.500,00	132.520.000,00	46,63
51		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	3	2	66,67	925.000.000,00	83.535.200,00	9,03
52		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	2	66,67	11.716.825.000,00	7.282.542.500,00	62,15
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		%	100	50	50	3.089.068.000,00	396.202.877,00	12,8
53		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12	6	50	3.089.068.000,00	396.202.877,00	12,83
		Fasilitasi Tugas DPRD		%	100	37,5	37,5	19.996.580.711,00	3.943.241.690,00	19,7
54		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	0	0	5.495.820.000,00	0	0
55		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	1	100	1.209.194.711,00	427.790.509,00	35,38
56		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	3	0	0	11.991.566.000,00	2.819.200.602,00	23,51
57		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	6	50	1.300.000.000,00	696.250.579,00	53,56

Sumber: <https://siencang.bekasikota.go.id/monev2025> dan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/2025> (Data diolah)

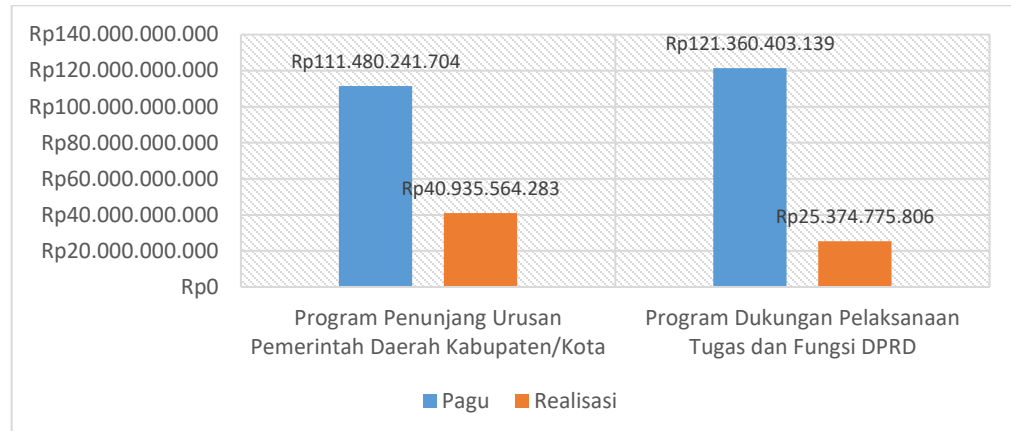
Tabel di atas menunjukkan bahwa sudah terdapat beberapa Kegiatan/ Sub. Kegiatan yang sudah dilaksanakan, terlihat dari realisasi yang dihasilkan, dan sudah sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan lainnya belum terdapat keluarannya dikarenakan belum adanya jadwal pembahasan/ pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Evaluasi hasil terhadap renja perangkat daerah Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 – Triwulan II, rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah **35.30%** dengan predikat kinerja kegiatan adalah **“Sangat Rendah”**. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini tentunya dikarenakan banyak kegiatan yang baru dilaksanakan pada Triwulan II dan seterusnya.

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU .
3. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, untuk mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga memahami tata cara proses pelaporan dan monev, sehingga kinerja dapat diukur.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi, sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat, sebagai dasar pengolahan data, perumusan analisis, dan rekomendasi.

Grafik 2. 3
Pagu Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025



Sumber: SIPD Kota Bekasi, 2025

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 melaksanakan kegiatannya didukung anggaran, yaitu untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 111.480.241.704,00,- dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 121.360.403.139,- sehingga total anggaran murni Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 232.840.644.843,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Chart 2.1
Realisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025



2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Untuk mencapai keberhasilan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 2 (dua) sasaran yang harus diwujudkan yaitu : (1) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah; dan (2) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.2.1 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024

Untuk mencapai keberhasilan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3
Perbandingan Capaian IKU dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra			Realisasi Capaian			Realisasi Kinerja (%)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	%	75.30	75.40	75.50	60.87	-	-	80.84	-	-
2	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	%	75.30	75.40	75.50	100	-	-	132.80	-	-
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	%	75.30	75.40	75.50	100	-	-	132.80	-	-
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.70	77.8	77.9	63.38	-	-	69.62	-	-

Sumber : Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2025

Pada indikator kinerja **“Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu”**, target dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2024 adalah 75.30%. Pada tahun 2024, realisasi capaian yang tercatat adalah 60.87%, yang sedikit lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Kinerja ini menunjukkan adanya ruang perbaikan untuk mencapai target pada tahun-tahun mendatang.

Pada indikator kinerja **“Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu”**, juga memiliki target yang sama, yaitu 75.30% pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, capaian yang tercatat mencapai 100%, yang berarti pengesahan anggaran telah dilakukan tepat waktu, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian ini juga menunjukkan kinerja yang optimal di tahun 2024, dengan potensi untuk terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan di tahun 2025 dan 2026.

Pada indikator kinerja **“Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu”**, memiliki target yang sama dengan dua indikator lainnya, yaitu 75.30%. Pada tahun 2024, capaian yang tercatat adalah 100%, yang menandakan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah berhasil dilaksanakan tepat waktu. Seperti halnya dengan pengesahan anggaran, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Pada indikator kinerja **“Nilai AKIP Perangkat Daerah”** yang diukur dengan satuan nilai, terdapat target dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2024 sebesar 77.70. Namun, pada tahun 2024, realisasi nilai AKIP yang tercatat adalah 69.62 atau sebesar 89.60%. yang menunjukkan pencapaian yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yang berarti meskipun ada kekurangan dibandingkan target yang diinginkan, terdapat pencapaian yang cukup signifikan. Hal ini memberikan

gambaran bahwa terdapat ruang perbaikan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah di tahun-tahun mendatang.

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 telah menetapkan target kinerja selama 3 tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 2.2. Untuk tahun 2025 dan 2026, tidak terdapat data yang tersedia atau tercatat untuk nilai capaian dan target untuk indikator sasaran “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu” dan “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” serta “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu”, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan atau analisis lebih lanjut terkait kinerja perangkat daerah pada tahun-tahun tersebut. Meskipun tidak ada data capaian untuk tahun 2025 dan 2026, pencapaian yang sangat baik pada tahun 2024 memberikan gambaran bahwa kinerja ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.

1. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD” yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” telah tercapai di bawah target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 60.87 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 80.84%.

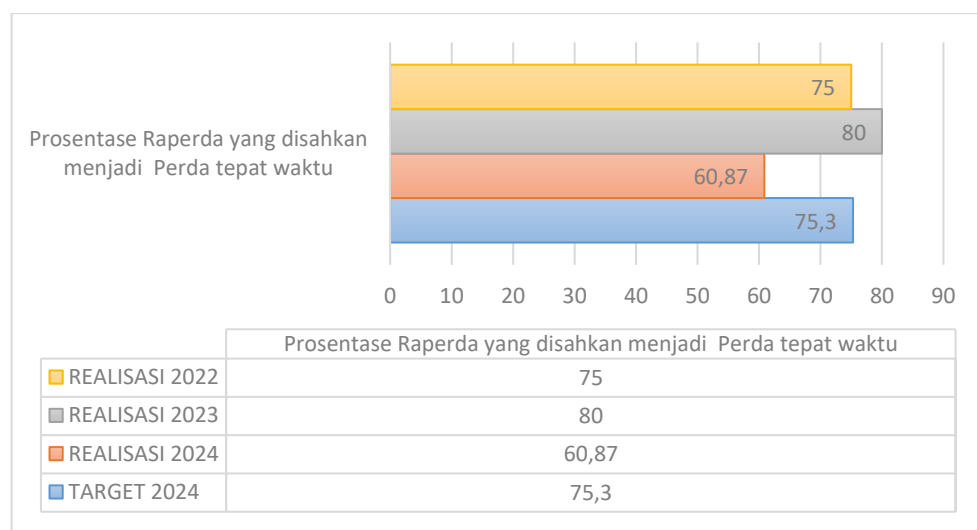
Nilai capaian yang di peroleh dari indikator “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” diperoleh melalui hasil realisasi Pansus yang sudah paripurna di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Dari 17 (tujuh belas) yang sudah diparipurnakan oleh Pansus, 3 (tiga) diantaranya bukan

merupakan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) melainkan Peraturan DPRD. Kemudian dari 14 (empat belas) judul Raperda yang paripurnakan terdapat 10 (sepuluh) judul Raperda yang merupakan fasilitasi dari penyelesaian target Raperda dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan Raperda yang disahkan di tahun 2024 yang merupakan target di tahun 2024.

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran di Tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 4

**Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian
"Prosentase Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda Tepat Waktu"
Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun**



Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Indikator capaian nilai sasaran "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun. Nilai pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, demikian juga bila melihat target pada Tahun 2024 nilai realisasi kinerja yang diperoleh pada Tahun 2024 masih di bawah target yang telah ditetapkan, terdapat selisih nilai 14.43% dari target yang telah ditetapkan.

Nilai tersebut didapatkan dari penghitungan realisasi pengesahan judul Raperda yang ditetapkan menjadi target pengesahan di Tahun 2024. Di Tahun 2024 terdapat 14 (empat belas) Raperda yang disahkan menjadi Perda sebanyak 10 (sepuluh) di antaranya merupakan target pengesahan di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan 4 (empat) Raperda yang disahkan merupakan Target pengesahan Paripurna di Tahun 2024

Tidak tercapainya target pada indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Salah satu penyebab utama adalah adanya keterlambatan dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda. Proses ini melibatkan berbagai pihak, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif, yang memerlukan koordinasi yang intensif dan waktu yang cukup panjang untuk memastikan bahwa setiap Raperda memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada sering kali menghambat kelancaran proses ini, yang pada akhirnya berdampak pada pengesahan Raperda yang tidak tepat waktu.

Selain itu, hambatan yang lebih mendalam terletak pada kurangnya efektivitas dalam pengelolaan waktu dan prioritas pembahasan Raperda. Beberapa Raperda yang seharusnya disahkan pada tahun 2024 merupakan target yang belum tercapai dari tahun sebelumnya, menunjukkan adanya backlog atau tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan agenda kerja yang lebih baik di Sekretariat DPRD. Di samping itu, tantangan eksternal seperti dinamika politik yang berubah-ubah dan perbedaan pandangan antar anggota DPRD juga turut memengaruhi kelancaran proses pengesahan Raperda. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah ini,

diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait, pengelolaan waktu yang lebih efisien, serta komitmen yang kuat untuk menyelesaikan setiap tahapan proses pengesahan Raperda secara tepat waktu.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di Tahun 2024 untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi capaian kinerja indikator sasaran "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Pihak

Salah satu upaya utama adalah meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta antar komisi dan badan yang terlibat dalam pembahasan Raperda. Dengan komunikasi yang lebih baik, hambatan terkait perbedaan pandangan atau kurangnya pemahaman dapat diminimalkan, sehingga proses pembahasan dan pengesahan Raperda dapat berjalan lebih lancar dan sesuai jadwal.

2. Perbaiki Perencanaan dan Pengelolaan Waktu

Perencanaan yang lebih matang dan pengelolaan waktu yang lebih efektif sangat penting untuk menghindari keterlambatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan jadwal yang lebih realistis dan fleksibel, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses pengesahan Raperda. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kemajuan pembahasan Raperda juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. Penyelesaian Backlog Raperda

Untuk mengurangi tumpukan pekerjaan yang terjadi akibat Raperda yang belum disahkan pada tahun sebelumnya, langkah-langkah proaktif seperti

prioritisasi pengesahan Raperda yang tertunda perlu dilakukan. Pengesahan Raperda yang menjadi target tahun sebelumnya harus menjadi perhatian utama, agar tidak mengganggu target tahun berjalan.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD sangat penting untuk mendukung kelancaran proses administratif dan teknis dalam pengelolaan Raperda. Pelatihan dan pengembangan kompetensi staf terkait penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Raperda dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan yang dapat menghambat pengesahan tepat waktu.

5. Optimasi Teknologi dan Sistem Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola seluruh proses pembahasan Raperda juga dapat mempercepat jalannya pengesahan. Sistem yang terintegrasi akan mempermudah koordinasi, monitoring, dan pelaporan terkait status pembahasan Raperda, sehingga pihak-pihak terkait dapat segera mengambil tindakan bila terjadi keterlambatan.

6. Penguatan Komitmen dan Dukungan Politik

Komitmen yang kuat dari seluruh anggota DPRD untuk menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Raperda sesuai target juga merupakan faktor penting. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat dukungan politik terhadap prioritas pengesahan Raperda, serta memastikan bahwa setiap anggota DPRD memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya proses ini untuk kemajuan daerah.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara konsisten, diharapkan dapat tercapai pengesahan Raperda yang tepat waktu dan meningkatkan kualitas

layanan serta akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD ke depan.

2. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 100 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 132.80%.

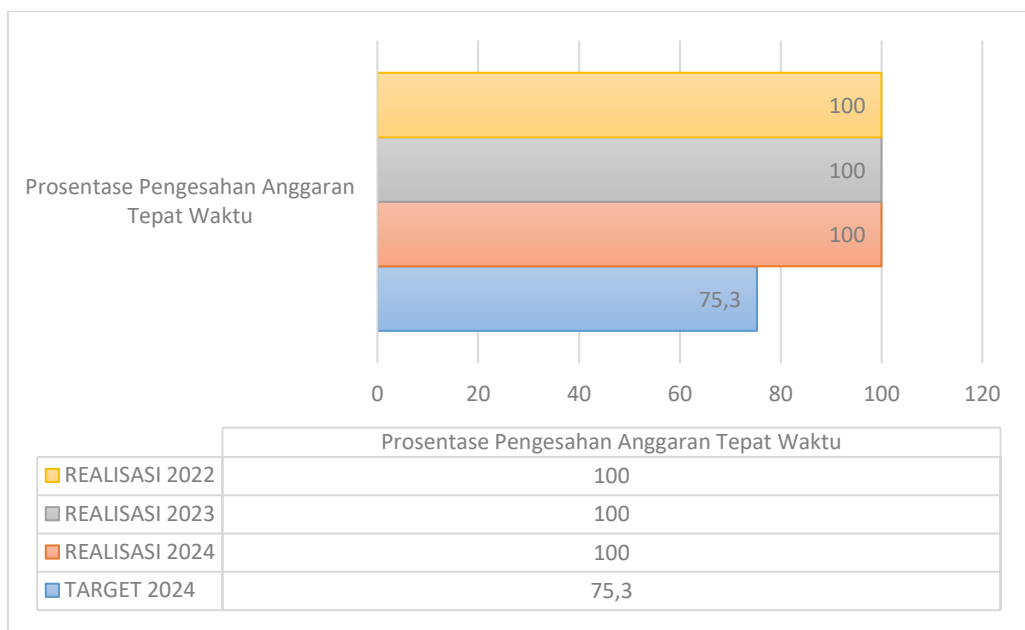
Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi pengesahan anggaran di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13).

Dengan melihat grafik di bawah, target tahun 2024 sebesar 75.30%, sementara realisasi 100% sudah mencapai target maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja Prosentase Fasilitasi Pengesahan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 132.80%.

Untuk melihat gambaran terkait progress kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi selama tiga tahun terakhir, yaitu capaian indikator sasaran di tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran pada tahun tahun 2023, dan tahun 2022 atas indikator kinerja Prosentase Fasilitasi Pengesahan Anggaran, maka dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 5
Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian
"Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu"
Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Grafik di atas menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja pada Sasaran Kedua, yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD," dengan fokus pada indikator "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu." Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD telah berhasil mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun, dengan pencapaian

100% untuk tahun 2022, 2023, dan 2024, yang melebihi target sebesar 75.3%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengesahan anggaran dilakukan tepat waktu, yang merupakan indikator penting dalam menjaga kelancaran operasional dan transparansi anggaran pemerintah daerah.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan yang baik dalam proses pengesahan anggaran, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, baik dari eksekutif maupun legislatif. Meskipun demikian, untuk menjaga pencapaian ini, Sekretariat DPRD perlu terus memastikan bahwa proses pengesahan anggaran tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan, dengan meningkatkan pengelolaan waktu, komunikasi yang lebih baik antar pihak terkait, serta memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung efisiensi dalam proses ini.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mencapai 100% pada indikator "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" pada tahun 2022, 2023, dan 2024 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor rasional yang mencerminkan keberhasilan manajerial dan koordinasi yang baik.

Pertama, **perencanaan yang matang dan terstruktur** memainkan peran penting dalam pencapaian ini. Sekretariat DPRD, bersama dengan eksekutif, telah merancang jadwal yang realistis untuk proses pengesahan anggaran, dengan memperhatikan waktu yang cukup untuk pembahasan, revisi, dan persetujuan. Penyusunan jadwal yang baik dan pengaturan waktu yang efisien memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengesahan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.

Kedua, **koordinasi yang efektif antara DPRD dan Pemerintah Daerah** juga menjadi faktor kunci. Komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang erat antara anggota DPRD, komisi terkait, serta instansi pemerintah yang mengusulkan anggaran mempermudah proses diskusi dan pengambilan keputusan. Tidak adanya kendala yang signifikan dalam koordinasi ini memungkinkan proses pengesahan anggaran berjalan dengan lancar sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, **kesiapan administratif dan sistem yang mendukung** turut berperan dalam kelancaran proses ini. Sekretariat DPRD telah memanfaatkan sistem administrasi dan teknologi yang memadai untuk memantau, mengelola, dan menyampaikan dokumen anggaran secara efisien. Hal ini meminimalisir hambatan teknis dan memungkinkan proses pengesahan anggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat waktu.

Keempat, **komitmen politik yang kuat** dari semua pihak terkait, baik legislatif maupun eksekutif, untuk menyelesaikan pengesahan anggaran dengan tepat waktu juga menjadi faktor penting. Dengan adanya pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengesahan anggaran tepat waktu untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik, seluruh pihak berkomitmen untuk menjaga agar proses ini dapat diselesaikan tanpa hambatan.

Dengan demikian, keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, pemanfaatan sistem yang efisien, serta komitmen politik yang kuat, yang semuanya berkontribusi pada

tercapainya pengesahan anggaran tepat waktu secara konsisten.

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pengesahan anggaran tepat waktu, Sekretariat DPRD perlu melaksanakan sejumlah upaya strategis yang berfokus pada penguatan sistem, perbaikan proses, dan pengembangan kapasitas. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. **Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Waktu**

Meskipun pengesahan anggaran tepat waktu telah tercapai, penting untuk terus memperbaiki proses perencanaan agar lebih efisien. Sekretariat DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Salah satunya adalah dengan merumuskan timeline yang lebih terperinci dan mempertimbangkan kemungkinan kendala yang dapat muncul, seperti perubahan kebijakan atau urgensi anggaran. Selain itu, penyesuaian target waktu dengan realitas yang ada akan memastikan tidak ada tahapan yang terburu-buru dan semua pihak dapat memberikan kontribusi maksimal.

2. **Optimalisasi Teknologi dan Sistem Informasi**

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran dapat lebih ditingkatkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengesahan. Sekretariat DPRD bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem berbasis digital yang lebih canggih, yang tidak

hanya memfasilitasi komunikasi antar pihak, tetapi juga memungkinkan pelacakan status setiap tahapan pengesahan anggaran secara real-time. Dengan adanya sistem yang lebih efisien dan terintegrasi, hambatan teknis dapat diminimalkan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat.

3. **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang memadai sangat berperan dalam kelancaran proses pengesahan anggaran. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD harus terus mengadakan pelatihan dan workshop bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Peningkatan kapasitas dalam hal pemahaman anggaran, pengelolaan dokumen, serta keterampilan komunikasi akan mempercepat proses administrasi dan pembahasan anggaran.

4. **Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Eksekutif dan Stakeholder Lainnya**

Koordinasi yang baik antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya adalah faktor penting dalam pengesahan anggaran tepat waktu. Sekretariat DPRD perlu terus memperkuat komunikasi antar lembaga, dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pengesahan anggaran memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama. Pembentukan forum komunikasi rutin atau rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat meningkatkan kerjasama dan mengurangi potensi keterlambatan akibat ketidaksepahaman atau kurangnya informasi.

5. **Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan**

Untuk memastikan proses pengesahan anggaran tetap berjalan lancar, perlu dilakukan evaluasi berkala

terhadap setiap tahapan pengesahan anggaran. Evaluasi ini dapat mencakup identifikasi kendala yang muncul, analisis waktu yang dibutuhkan di setiap langkah, serta umpan balik dari pihak terkait. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, Sekretariat DPRD dapat segera melakukan perbaikan dan penyesuaian guna mencegah terjadinya keterlambatan.

Dengan melaksanakan upaya-upaya tersebut, Sekretariat DPRD tidak hanya dapat mempertahankan pencapaian 100% dalam pengesahan anggaran tepat waktu, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam seluruh proses pengelolaan anggaran di masa mendatang. Keberlanjutan dan perbaikan ini akan memberikan dampak positif bagi kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

3. Analisis Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

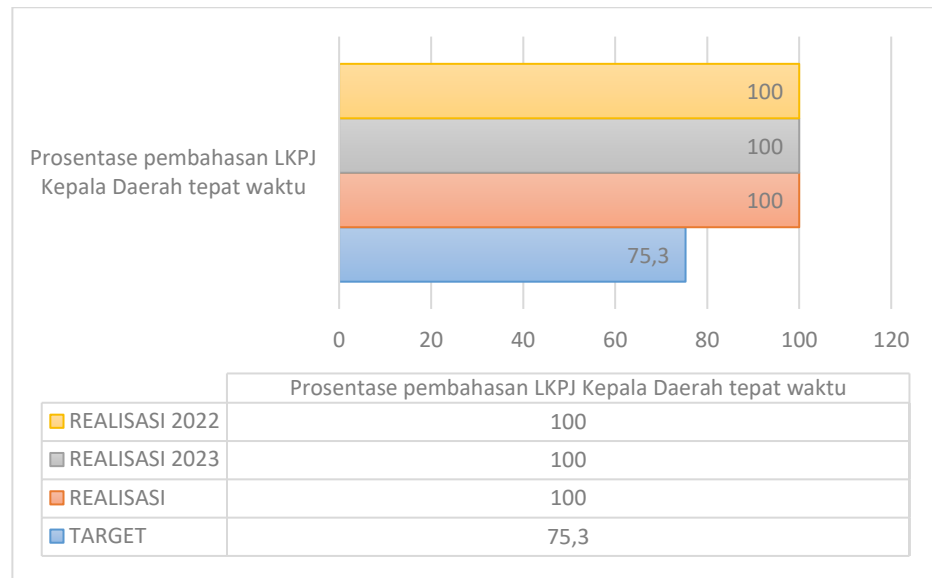
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 100 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 132.80%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi pengesahan LKPJ Kepala Daerah di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut:

Dengan melihat grafik di atas bahwa target tahun 2024 sebesar 75.30%, sementara realisasi 100% sudah mencapai target maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 132.80%.

Untuk melihat gambaran terkait progress kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi selama tiga tahun terakhir, yaitu capaian indikator sasaran di tahun tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran pada tahun tahun 2023, dan tahun 2022 atas indikator kinerja Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu, maka dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 6
Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian
"Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu"
Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Grafik di atas menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja pada Sasaran Kedua, yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD," dengan fokus pada indikator "Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu." Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100% pada tahun 2022, 2023, dan 2024, yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 75.3%.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya pengelolaan waktu yang baik, koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen yang tinggi dalam memastikan pembahasan LKPJ (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah) Kepala Daerah dilaksanakan tepat waktu. Proses pembahasan yang tepat waktu sangat penting dalam menjaga

transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, sehingga pencapaian ini menunjukkan efektivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung proses evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang, penting untuk terus memastikan bahwa proses pembahasan LKPJ dilakukan secara efisien, dengan pengelolaan waktu yang lebih baik dan koordinasi yang lebih intensif antara semua pihak terkait. Selain itu, evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas SDM akan membantu menjaga kualitas pembahasan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

4. Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya (LAN, 2003:26).

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah pemerintah, bergantung pada penerima

layanan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD sebagai fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas DPRD untuk memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sesuai yang di amanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu Sekretariat DPRD menuangkannya dalam sebuah sasaran yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel” dengan indikator sasaran yaitu “Nilai AKIP Perangkat Daerah”.

Perhitungan nilai AKIP sebagai berikut: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja – Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target.

Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja AKIP Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)	Ket
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.70	69.62	89.60	

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Setwan Kota Bekasi

Dari tabel diatas, terlihat bahwa hasil pengukuran kinerja sasaran "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel" memperoleh nilai realisasi sebesar 69,62 dari nilai target 77,70, atau bila di persentasekan mencapai 89,60%.

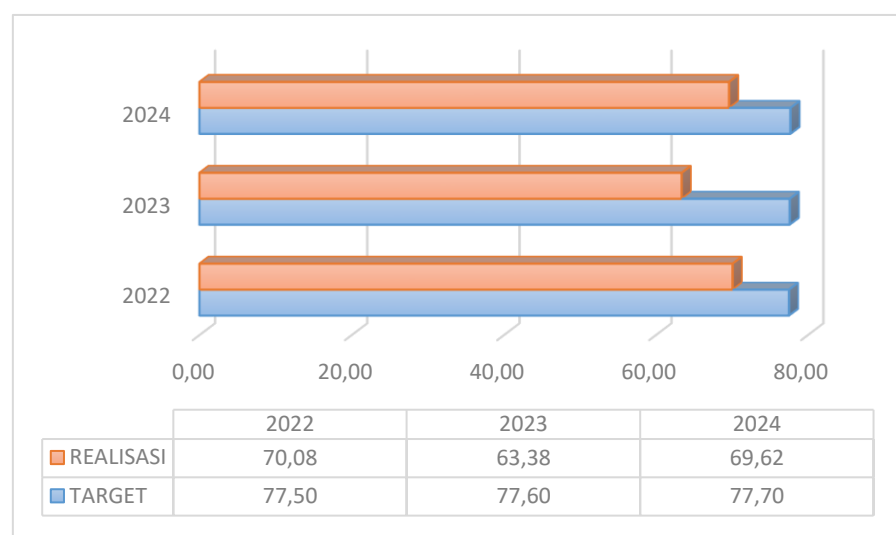
Tabel 2. 5
Penilaian Komponen AKIP Perangkat Daerah

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21.70
2	Pengukuran Kinerja	30	21.19
3	Pelaporan Kinerja	15	10.14
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.59
Nilai Hasil Evaluasi		100	69.62
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Komponen dalam pengukuran indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun hasil pengukuran dari ke 4 (empat) komponen tersebut dijabarkan pada tabel di atas.

Grafik 2. 7
Perbandingan Antara Realisasi "Nilai AKIP Perangkat Daerah" Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022



Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasar grafik di atas, capaian nilai indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun. Nilai pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun bila melihat target pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 nilai realisasi kinerja yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdapat selisih nilai sebesar 8,08 dari target yang telah ditetapkan.

Adapun penyebab belum tercapainya nilai indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" ialah disebabkan dikarenakan masih terdapat catatan dan perbaikan dari pemenuhan eviden dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD di Tahun 2024.

Namun demikian, kenaikan kinerja AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 disebabkan oleh beragam faktor baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun Evaluasi akuntabilitas kinerja internal seperti tampak pada Tabel 2.5, diantaranya adalah :

a) Perencanaan kinerja

Nilai perencanaan kinerja pada hasil evaluasi adalah 21.70 dari bobot 30. Dibutuhkan penyempurnaan pada dokumen perencanaan untuk memenuhi standar dokumen perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah, serta pedoman yang telah dilegalisasi sebagai dasar perencanaan kinerja.

b) Pengukuran kinerja

Nilai pengukuran kinerja pada hasil evaluasi adalah 21.19 dari bobot 30. Dibutuhkan pengukuran kinerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta pedoman yang telah dilegalisasi sebagai dasar pengumpulan bahan pengukuran kinerja.

c) Pelaporan kinerja

Nilai pelaporan kinerja pada hasil evaluasi adalah 10.14 dari bobot 15. Pelaporan kinerja dibutuhkan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memperoleh pelaporan kinerja perangkat daerah yang baik dan akuntabel.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah 16.59 dari bobot 25. Pada dokumen pendukung telah dilakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya mencapai target indikator tujuan dan sasaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Hasil evaluasi terhadap AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu :

- a) Perencanaan kinerja agar dijaga konsistensi penyebutan indikator sasaran pada rencana strategis dan rencana Kerja.
- b) Pengukuran kinerja agar dalam penyusunan Renstra diformalkan dengan penanggalan, serta menjaga keselarasan dan konsistensi antara rencana strategis dan rencana Kerja terutama pada uraian program, indikator program dan sub kegiatan.
- c) Pelaporan kinerja agar memiliki SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja yang telah diformalkan agar menjadi pedoman penyusunan laporan kinerja,

serta menampilkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada LKIP.

- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal perlu diperbaiki terutama pada bukti pendukung terhadap realisasi kinerja yang tidak mencapai target.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan yang berorientasi dengan hasil kinerja;
- b) Melaksanakan pengukuran kinerja yang berjenjang melalui rapat evaluasi internal pada tiap akhir triwulan;
- c) Memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai *feedback* hasil kinerja pada Tahun Anggaran berjalan.

2.2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 s/d Triwulan II

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Adapun dengan anggaran setelah efisiensi sebesar Rp. 232.840.644.843,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut adalah

Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu, Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu, Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu, dan Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tampak pada tabel di bawah:

Tabel 2.6
Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025
Terhadap Indikator Kinerja Utama

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat	75.40%	10%	-
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75.40%	(belum dapat dihitung)	-
		Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	75.40%	100%	-
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.80	Nilai Belum Keluar	-

Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari keempat indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi belum dapat dilihat realisasinya, sehingga tingkat capaian kinerja masih 0%.

1. Capaian indikator sasaran Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda sebesar 10% dengan tersusunnya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu sudah dilakukan beberapa pembahasan diantaranya: pembahasan raperda tentang RPJMD Kota Bekasi 2024-2029, Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah dan Pembahasan Perubahan Raperda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Capaian indikator Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu belum dapat dihitung dikarenakan jadwal kegiatan terdapat pada Triwulan III Tahun 2025, sehingga belum dilakukan pembahasan terkait anggaran.
3. Capaian indikator Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu sebesar 100%. Sesuai dengan rencana tersusun 1 laporan Dokumen Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah di Bulan April S/D Juni 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

1. Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 telah melakukan pelayanan terhadap DPRD Kota Bekasi melalui 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Pada subbab sebelumnya dijelaskan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 35,27% dengan serapan anggaran Rp. 66.310.340.089,00,- (Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribuan Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

2. Dalam pelayanannya Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki permasalahan dan hambatan. Identifikasi permasalahan dan hambatan Sekretariat DPRD didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencapaian IKU maupun IKK antara lain:
 - a. Kualitas Layanan yang Tidak Konsisten.
Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan adanya masalah dalam konsistensi layanan.
 - b. Tidak tercapainya target Pengesahan Raperda menjadi Perda.
Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu masih di bawah target, menunjukkan adanya kendala dalam proses legislasi.
 - c. Agenda DPRD yang dinamis.
Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan tugas Anggota DPRD menjadi terkendala dikarenakan sering terjadi perubahan jadwal pembahasan dari agenda yang telah ditetapkan.
 - d. Keterlambatan dalam Pembahasan LKPJ.
Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu menunjukkan adanya masalah dalam koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah.
 - e. Nilai AKIP yang tidak mencapai target.
Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan angka yang tidak memuaskan, mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan.
3. Permasalahan dan hambatan tersebut diatas tentunya akan berpengaruh kepada pencapaian tujuan organisasi yang tertuang pada IKU (Indikator Kinerja Utama).
4. Tantangan dan Peluang Sekretariat DPRD Kota Bekasi
Tantangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Harapan Masyarakat:
Masyarakat mengharapkan layanan yang lebih baik dan transparan, yang menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD untuk memenuhi ekspektasi tersebut.
- b. Sumber Daya Manusia yang Terbatas:
Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM di Sekretariat DPRD dapat menghambat efektivitas pelayanan.
- c. Kompleksitas Proses Legislasi:
Proses legislasi yang kompleks dan memerlukan banyak tahapan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan Raperda.
- d. Perubahan Kebijakan yang Cepat:
Perubahan kebijakan yang cepat di tingkat nasional dan regional dapat menyulitkan perangkat daerah dalam menyesuaikan diri.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan.
- b. Kerjasama dengan Stakeholder:
Membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder dapat meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas.
- c. Program Pelatihan untuk SDM:
Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM di Sekretariat DPRD.
- d. Inisiatif Partisipasi Masyarakat:
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

- e. Pengembangan Sistem Pelaporan yang Efektif:
Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efektif untuk memantau kinerja dan hasil program.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, isu penting yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Bekasi antara lain:
 - a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.
 - b. Penguatan Kapasitas SDM.
Memperkuat kapasitas SDM Sekretariat DPRD dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Didalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dengan cara seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan, mengatasi tantangan, membangun inovasi, meningkatkan daya saing bagi organisasi.

- c. **Optimalisasi Proses Legislasi.**
Mengoptimalkan proses legislasi untuk memastikan pengesahan Raperda dan anggaran tepat waktu. Optimalisasi proses legislasi berkaitan erat dengan dengan efektivitas DPRD Kota Bekasi dan/atau fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam membuat pembentukan peraturan-peraturan, mulai dari proses pembahasan sampai dengan proses pengesahan belum optimal. Kepentingan politik, kualitas produk legislasi serta kemampuan SDM berpengaruh kepada optimalnya proses legislasi.
- d. **Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan**
Selain menyusun Peraturan Daerah terdapat dua fungsi lain yang harus dijalankan oleh DPRD Kota Bekasi, yaitu fungsi penganggaran dan pengawasan. Fungsi penganggaran terkait dengan penyusunan dan pengesahan APBD dan APBDP Kota Bekasi termasuk, sedangkan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terdistribusi kepada perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Optimalisasi dukungan terhadap kedua fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD Kota Bekasi.
- e. **Peningkatan Harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif.**
Meningkatkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Hal ini sangat penting yaitu untuk memastikan agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Harmonisasi yang baik akan Meningkatkan kolaborasi yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.

2.4. Review terhadap Ranwal RKPD Tahun 2026

Proses *review* terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 sudah terakomodir dalam Rancangan Awal RKPD atau belum, dengan demikian, usulan dapat diajukan kembali pada tahapan Rancangan RKPD.

Dikarenakan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi, maka terdapat perbedaan pagu antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis hasil kebutuhan. Adapun hasil *review* Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis hasil kebutuhan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.7 (Tabel T-C 31) di bawah:

Tabel 2.7
Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
	SEKRETARIAT DPRD					219.165.099.233		SEKRETARIAT DPRD					219.165.099.233	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				100%	111.816.658.562	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				100%	111.816.658.562	
	Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persen (%)	98%	80.000.000		Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persen (%)	98%	80.000.000	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Dokumen	7	80.000.000	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Dokumen	7	80.000.000	
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bekasi Timur	Dokumen	3	40.000.000	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bekasi Timur	Dokumen	3	40.000.000	
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Bekasi Timur	Laporan	4	40.000.000	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Bekasi Timur	Laporan	4	40.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	16.402.446.000		Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	16.402.446.000	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	18	16.402.446.000	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	18	16.402.446.000	
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	Orang/bulan	2086	16.338.446.000	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	Orang/bulan	2086	16.338.446.000	
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	Laporan	2	40.000.000	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	Laporan	2	40.000.000	
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bekasi Timur	Laporan	15	24.000.000	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bekasi Timur	Laporan	15	24.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
	Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Nilai	86.2	951.170.000		Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Nilai	86.2	951.170.000	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	2	951.170.000	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	2	951.170.000	
0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bekasi Timur	Orang	52	379.170.000	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bekasi Timur	Orang	52	379.170.000	
0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bekasi Timur	Orang	48	572.000.000	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bekasi Timur	Orang	48	572.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	7.241.566.562		Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	7.241.566.562	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	36	7.241.566.562	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	36	7.241.566.562	
0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Bekasi Timur	Paket	1	150.000.000	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Bekasi Timur	Paket	1	150.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
	Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan					
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	Paket	4	3.300.000.000	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	Paket	4	3.300.000.000	
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bekasi Timur	Paket	3	459.116.562	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bekasi Timur	Paket	3	459.116.562	
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bekasi Timur	Dokumen	4	580.000.000	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bekasi Timur	Dokumen	4	580.000.000	
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bekasi Timur	Laporan	12	1.752.450.000	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bekasi Timur	Laporan	12	1.752.450.000	
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Timur	Laporan	12	1.000.000.000	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Timur	Laporan	12	1.000.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	96,54	2.200.000.000		Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	96,54	2.200.000.000	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan		Laporan	220	2.200.000.000	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan		Laporan	220	2.200.000.000	
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bekasi Timur		220	2.200.000.000	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bekasi Timur		220	2.200.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	1.475.000.000		Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	1.475.000.000	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	60	1.475.000.000	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	60	1.475.000.000	
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bekasi Timur	Laporan	12	25.000.000	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bekasi Timur	Laporan	12	25.000.000	
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bekasi Timur	Laporan	36	1.200.000.000	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bekasi Timur	Laporan	36	1.200.000.000	
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	Laporan	12	250.000.000	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	Laporan	12	250.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	96,54	10.792.000.000		Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	96,54	10.792.000.000	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara		Laporan	314	10.792.000.000	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara		Laporan	314	10.792.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	Unit	33	510.000.000	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	Unit	33	510.000.000	
0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bekasi Timur	Unit	100	100.000.000	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bekasi Timur	Unit	100	100.000.000	
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	Unit	177	832.000.000	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	Unit	177	832.000.000	
0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bekasi Timur	Unit	4	9.350.000.000	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bekasi Timur	Unit	4	9.350.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	71.634.476.000		Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	71.634.476.000	
2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD		Laporan	57	71.634.476.000	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD		Laporan	57	71.634.476.000	
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bekasi Timur	Orang/Bulan	650	70.614.476.000	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bekasi Timur	Orang/Bulan	650	70.614.476.000	
0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Bekasi Timur	Paket	6	770.000.000	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Bekasi Timur	Paket	6	770.000.000	
0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Bekasi Timur	Orang	50	250.000.000	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Bekasi Timur	Orang	50	250.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	1.040.000.000		Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	1.040.000.000	
2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD		Laporan	13	1.040.000.000	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD		Laporan	13	1.040.000.000	
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	1	40.000.000	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	1	40.000.000	
0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Bekasi Timur	Laporan	12	1.000.000.000	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Bekasi Timur	Laporan	12	1.000.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				100%	107.348.440.671	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				100%	107.348.440.671	
	Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N		Persen (%)	100%	20.638.181.000		Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N		Persen (%)	100%	20.638.181.000	
2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Laporan	6	20.638.181.000	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Laporan	6	20.638.181.000	
0001	Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.450.000.000	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.450.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembentukan Peraturan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah							Pembentukan Peraturan Daerah					
0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	Dokumen	1	6.682.250.000	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	Dokumen	1	6.682.250.000	
0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian PerundangUndangan	Bekasi Timur	Dokumen	1	4.492.831.000	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian PerundangUndangan	Bekasi Timur	Dokumen	1	4.492.831.000	
0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Bekasi Timur	Dokumen	1	5.122.010.000	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Bekasi Timur	Dokumen	1	5.122.010.000	
0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	Dokumen	1	391.090.000	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	Dokumen	1	391.090.000	
0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Bekasi Timur	Orang	10.000 orang	2.500.000.000	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Bekasi Timur	Orang	10.000 orang	2.500.000.000	
	Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N		Tepat Waktu/Tidak Tepat	Tepat Waktu	6.000.000.000		Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N		Tepat Waktu/Tidak Tepat	Tepat Waktu	6.000.000.000	
2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Laporan	6	6.000.000.000	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Laporan	6	6.000.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.500.000.000	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.500.000.000	
0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	
0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	
0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	
0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Bekasi Timur	Dokumen	1	500.000.000	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Bekasi Timur	Dokumen	1	500.000.000	
0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persen (%)	100%	26.027.561.056		Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persen (%)	100%	26.027.561.056	
2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Laporan	51	26.027.561.056	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Laporan	51	26.027.561.056	
0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	
0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	
0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	
0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	
0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Bekasi Timur	Dokumen	1	5.500.000.000	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Bekasi Timur	Dokumen	1	5.500.000.000	
0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.969.880.000	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.969.880.000	
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan	Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD		Persen (%)	100%	54.682.698.615		Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan	Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD		Persen (%)	100%	54.682.698.615	
2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD		Laporan	24	22.555.052.000	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD		Laporan	24	22.555.052.000	
0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	1	27.440.000,00	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	1	27.440.000,00	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	6	5.250.000.000	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	6	5.250.000.000	
0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bekasi Timur	Orang	210	2.821.612.000	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bekasi Timur	Orang	210	2.821.612.000	
0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bekasi Timur	Orang	72	756.000.000	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bekasi Timur	Orang	72	756.000.000	
0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bekasi Timur	Dokumen	12	12.000.000.000	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bekasi Timur	Dokumen	12	12.000.000.000	
0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	3	1.700.000.000	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	3	1.700.000.000	
2.05	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Laporan	100%	16.615.007.500	2.05	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Laporan	100%	16.615.007.500	
001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Bekasi Timur	Laporan	3	284.182.500	001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Bekasi Timur	Laporan	3	284.182.500	
0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	Dokumen	3	925.000.000	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	Dokumen	3	925.000.000	
0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Bekasi Timur	Dokumen	3	13.605.825.000	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Bekasi Timur	Dokumen	3	13.605.825.000	
0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	Orang	7500	1.800.000.000	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	Orang	7500	1.800.000.000	
2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Laporan	12	2.089.068.000	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Laporan	12	2.089.068.000	
0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Bekasi Timur	Laporan	12	2.089.068.000	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Bekasi Timur	Laporan	12	2.089.068.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD		Laporan	16	13.423.571.115	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD		Laporan	16	13.423.571.115	
0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	1 Dokumen	1.373.571.115	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	1 Dokumen	1.373.571.115	
0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	Laporan	1	750.000.000	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	Laporan	1	750.000.000	
0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Bekasi Timur	Dokumen	3	10.000.000.000	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Bekasi Timur	Dokumen	3	10.000.000.000	
0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	12	1.300.000.000	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	12	1.300.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses ini sebagai wadah mengumpulkan usulan-usulan dari Seluruh *stakeholder* yang didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Tabel T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh caapaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Dalam menetapkan visi misi Pemerintah Kota Bekasi harus selaras dengan arah pembangunan Jawa Barat 2025-2029 dan implementasi Asta Cita 2025-2029 pada tingkat nasional, Sekretariat DPRD Kota Bekasi wajib mengikuti dan mengimplementasikan NSPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap proses administratif, pengelolaan dokumen, pelaksanaan anggaran, serta pelayanan publik terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. NSPK merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada periode tahun 2025-2029. NSPK yang diterapkan merupakan acuan utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dalam menjalankan berbagai kebijakan, program, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 3. 1
Konsep Renstra PD



Sumber: Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

A. UU 23 Tahun 2014/ PP 18 Tahun 2016

Sebagaimana telah diamanatkan pada Paragraf 7 Pasal 162 ayat (10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Demikian juga pada Paragraf 2 Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/ kota;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/ kota;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

B. Asta Cita

Asta Cita merupakan visi-misi pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2029 yang diusung oleh pemerintah pusat sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Asta Cita mengandung Visi yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dan delapan misi utama yang mengarahkan pembangunan nasional ke arah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Gambar 3. 2
Visi Kabinet Merah Putih

Bersama	Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri Terbaik Bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama
Indonesia Maju	Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Menuju	Dengan tujuan yang jelas, yaitu
Indonesia Emas	Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat

Gambar 3. 3
8 (delapan) Misi Utama Asta Cita

1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HÁM).	5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mengoptimalkan implementasi Asta Cita, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan visi dan misi pembangunan di tingkat provinsi maupun daerah.

C. Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan visi dan misi sebagai pedoman strategis pembangunan daerah untuk periode 2025-2029. Visi dan misi ini dirumuskan dengan memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang beragam dan dinamis. Melalui visi dan misi tersebut, Jawa Barat berkomitmen untuk menjadi provinsi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, yang mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ekonomi yang adil, serta melestarikan lingkungan hidup demi kesejahteraan seluruh warga.

Visi dari Provinsi Jawa Barat yaitu Jabar Istimewa, yaitu situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur **berkeinginan/berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat**, baik Istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Visi Jabar Istimewa ini didukung dengan 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkarakter;
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Menjaga keseimbangan Disparitas Pembangunan Utara-Selatan, Miskin dan Kaya, serta Perkotaan dan Pedesaan;
4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, berorientasi pelayanan, dan sesuai dengan prinsip *Good and Clean Governance*.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi menyelaraskan visi dan misi daerahnya dengan visi dan misi provinsi guna menjamin keselarasan pembangunan

daerah dalam kerangka pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh.

D. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan kebudayanya di Kota Bekasi. Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

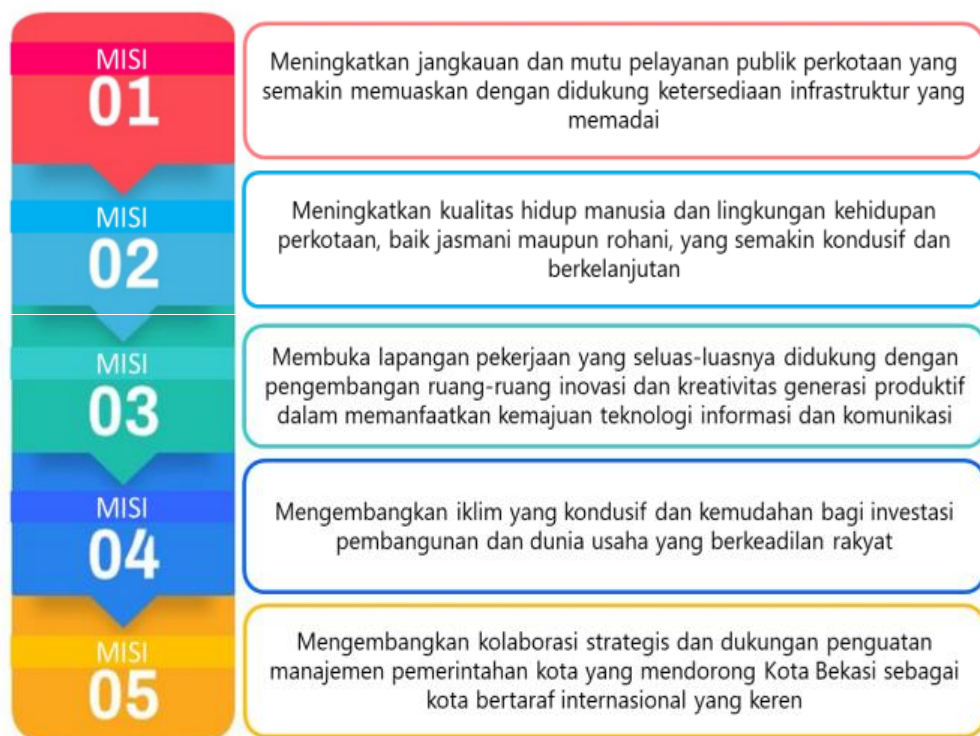
Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.



Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

E. Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

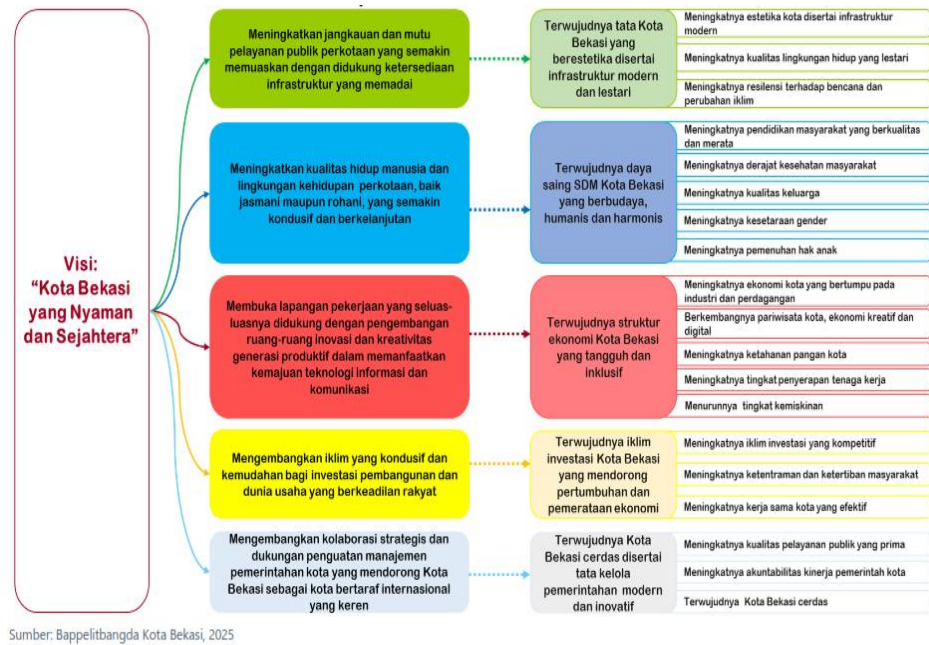
Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.



Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

F. Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan Pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.



G. Tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahun. RPJMD berfungsi untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD, dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Dari data di atas, keterkaitan antara Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi adalah:

- Visi : Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera
- Misi : Misi ke 5 (lima), yaitu Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.
- Tujuan : Tujuan ke 5 (lima), yaitu Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata Kelola pemerintahan modern yang inovatif.

Sasaran : Sasaran ke-17 (tujuh belas) yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima”

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk menyusun rencana strategis yang berlandaskan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. IKK ini menjadi acuan penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil selama periode 2025-2029, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tabel 3. 1
Tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50

Sumber dSumber Data: Bagian Program dan Keuangan (diolah)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil. Tujuan pada Renja ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2026. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi secara optimal, Sekretariat DPRD menetapkan tujuan strategis utama, yaitu mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan efisien. Tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam rencana strategis tahun 2025-2029.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD menggunakan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan sebagai ukuran utama. Indikator ini mencerminkan sejauh mana Sekretariat mampu memberikan layanan yang responsif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan.

Untuk mencapai tujuan dan indikator tersebut, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis yang menjadi fokus pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. Keterkaitan yang erat antara tujuan, indikator, dan sasaran ini menciptakan kerangka kerja yang sinergis bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategisnya. Dengan mengedepankan tingkat kepuasan anggota DPRD sebagai indikator kunci, seluruh sasaran yang telah ditetapkan diarahkan untuk menghasilkan pelayanan yang profesional dan mendukung ketercapaian tujuan utama. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai unit pendukung yang handal dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tujuan, sasaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					Ket	
				2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
NSPK: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	Nilai
		Terpenuhinya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen (%)

Sumber data: Sekretariat DPRD Kota Bekasi (diolah)

Dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD, kami telah menetapkan beberapa sasaran yang terukur dan relevan. Setiap sasaran ini akan dievaluasi menggunakan indikator yang telah ditentukan, yang akan memberikan gambaran jelas tentang pencapaian kinerja.

Berikut adalah penjelasan mengenai indikator dan rumus pengukurannya:

A. Rumusan Penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi

1. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD

Penjelasan/Rumus	Sumber Data
<p>Nilai tingkat kepuasan diukur melalui kuesioner berupa pertanyaan atas 9 (sembilan dimensi layanan) yaitu: kinerja, kompetensi aparatur, kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan, pelayanan keuangan, perilaku aparatur, integritas aparatur, akuntabilitas serta sarana dan prasarana.</p> <p>Responden seluruh anggota DPRD, dengan pilihan jawaban:</p> <p>Sangat Baik (Skor 4) Baik (Skor 3) Kurang Baik (Skor 2) Tidak Baik (Skor 1)</p> <p>Data jawaban responden diolah dengan table Krecjie & Morgan untuk mendapatkan hasil dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>Sangat Baik Nilai 88,31 – 100 Baik Nilai 76,61 – 88,30 Kurang Baik Nilai 65,00 – 76,60 Tidak Baik Nilai 25,00 – 64,99</p>	<p>Bagian Umum Bagian PK Bagian PP Bagian FPP</p>

Nilai tingkat kepuasan diukur melalui kuesioner berupa pertanyaan atas 9 (sembilan dimensi layanan) yaitu: kinerja, kompetensi aparatur, kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan, pelayanan keuangan, perilaku aparatur, integritas aparatur, akuntabilitas serta sarana dan prasarana.

2. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Penjelasan/Rumus	Sumber Data
<p>Tugas dan fungsi DPRD meliputi: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Tingkat persentase diukur terhadap fasilitasi atas 3 (tiga) tugas dan fungsi DPRD dengan rumus :</p> $\frac{\text{Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N} + \text{Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N} + \text{Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan} + \text{Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD}}{4}$	<p>Bagian Umum Bagian PK Bagian PP Bagian FPP</p>

Tugas dan fungsi DPRD meliputi: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

B. Rumusan Penghitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Kota Bekasi

1. Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N

(Jumlah SK Penugasan dan SK Pembentukan / Jumlah Raperda yang akan dibahas berdasarkan rapat BANMUS) x 100%

2. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

Tepat waktu/Tidak tepat waktu

3. Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

$(\text{Jumlah pengawasan terhadap perangkat daerah yang terfasilitasi} / \text{Jumlah perangkat daerah}) \times 100\%$

4. Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD

$(\text{Jumlah dokumen perencanaan fasilitasi layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD yang terealisasi} / \text{Jumlah dokumen perencanaan fasilitasi layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD}) \times 100\%$

3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi periode 2025-2029, Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyusun program-program strategis yang berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program-program ini dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi, serta selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi dan strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan.

Secara rinci berikut adalah program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 serta perkiraan maju Tahun 2027:

Tabel 3. 3

Tabel T-C.33 Rumusan Rankhir Rencana Program dan Kegiatan
Serketariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Rencana Tahun 2026			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Ket
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	SEKRETARIAT DPRD						219.165.099.233		227.104.170.960	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					100%	111.816.658.562	100%	115.171.158.319	
	Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)		98%	80.000.000	98%	80.000.000	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Dokumen		7	80.000.000	7	80.000.000	
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Bekasi Timur	3	40.000.000	3	40.000.000	
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Bekasi Timur	4	40.000.000	4	40.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)		88	16.402.446.000	88	16.892.599.380	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan		18	16.402.446.000	18	16.892.599.380	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Rencana Tahun 2026			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Ket
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Bekasi Timur	2086	16.338.446.000	2086	16.828.599.380	
0005	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Bekasi Timur	2	40.000.000	2	40.000.000	
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Bekasi Timur	15	24.000.000	15	24.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai		86.2	951.170.000	86.2	979.705.100	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan		2	951.170.000	2	979.705.100	
0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Bekasi Timur	52	379.170.000	52	390.545.100	
0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Bekasi Timur	48	572.000.000	48	589.160.000	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)		88	7.241.566.562	88	7.458.813.559	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan		36	7.241.566.562	36	7.458.813.559	
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Bekasi Timur	1	150.000.000	1	154.500.000	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Rencana Tahun 2026			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Ket
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Bekasi Timur	4	3.300.000.000	4	3.399.000.000	
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Bekasi Timur	3	459.116.562	3	472.890.059	
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Bekasi Timur	4	580.000.000	4	597.400.000	
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Bekasi Timur	12	1.752.450.000	12	1.805.023.500	
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Bekasi Timur	12	1.000.000.000	12	1.030.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)		96,54	2.200.000.000	96,54	2.271.520.000	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Laporan		1	2.200.000.000	1	2.271.520.000	
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Bekasi Timur	220	2.200.000.000	220	2.271.520.000	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)		88	1.475.000.000	88	1.519.250.000	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan		60	1.475.000.000	60	1.519.250.000	
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Bekasi Timur	12	25.000.000	12	25.750.000	
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Bekasi Timur	36	1.200.000.000	36	1.236.000.000	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Rencana Tahun 2026			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Ket
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Bekasi Timur	12	250.000.000	12	257.500.000	
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)		96,54	10.792.000.000	96,54	11.115.760.000	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Laporan		4	10.792.000.000	4	11.115.760.000	
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Bekasi Timur	33	510.000.000	33	525.300.000	
0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Bekasi Timur	100	100.000.000	100	103.000.000	
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Bekasi Timur	177	832.000.000	177	856.960.000	
0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Bekasi Timur	4	9.350.000.000	4	9.630.500.000	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)		88	71.634.476.000	88	73.783.510.280	
2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD	Laporan		57	71.634.476.000	57	73.783.510.280	
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	Bekasi Timur	650	70.614.476.000	650	72.732.910.280	
0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	Bekasi Timur	6	770.000.000	6	793.100.000	
0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	Bekasi Timur	50	250.000.000	50	257.500.000	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Rencana Tahun 2026			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Ket
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)		88	1.040.000.000	88	1.070.000.000	
2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersusunnya Laporan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	Laporan		13	1.040.000.000	13	1.070.000.000	
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	Bekasi Timur	1	40.000.000	1	40.000.000	
0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	Bekasi Timur	12	1.000.000.000	12	1.030.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					100%	107.348.440.671	100%	111.933.012.641	
	Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N	Persen (%)		100%	20.638.181.000	100%	22.257.326.430	
2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersusunnya Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Laporan		6	20.638.181.000	6	22.257.326.430	
0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	Bekasi Timur	1	1.450.000.000	1	1.693.500.000	
0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Bekasi Timur	1	6.682.250.000	1	7.082.717.500	
0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian PerundangUndangan	Dokumen	Bekasi Timur	1	4.492.831.000	1	4.827.615.930	
0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	Bekasi Timur	1	5.122.010.000	1	5.475.670.300	
0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	Bekasi Timur	1	391.090.000	1	402.822.700	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Rencana Tahun 2026			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Ket
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	Bekasi Timur	10.000 orang	2.500.000.000	10.000 orang	2.775.000.000	
	Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat		Tepat Waktu	6.000.000.000	Tepat Waktu	6.544.118.750	
2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terbahasnya Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Laporan		6	6.000.000.000	6	6.544.118.750	
0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	Bekasi Timur	1	1.500.000.000	1	1.545.000.000	
0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	Bekasi Timur	1	1.000.000.000	1	1.030.000.000	
0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	Bekasi Timur	1	1.000.000.000	1	1.394.118.750	
0004	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	Bekasi Timur	1	1.000.000.000	1	1.030.000.000	
0005	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	Bekasi Timur	1	500.000.000	1	515.000.000	
0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	Bekasi Timur	1	1.000.000.000	1	1.030.000.000	
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen (%)		100%	26.027.561.056	100%	26.808.387.888	
2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan		51	26.027.561.056	51	26.808.387.888	
0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	Bekasi Timur	12	4.389.420.264	12	4.521.102.872	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Rencana Tahun 2026			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Ket
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	Bekasi Timur	12	4.389.420.264	12	4.521.102.872	
0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	Bekasi Timur	12	4.389.420.264	12	4.521.102.872	
0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	Bekasi Timur	12	4.389.420.264	12	4.521.102.872	
0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	Bekasi Timur	1	1.000.000.000	1	1.030.000.000	
0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	Bekasi Timur	1	5.500.000.000	1	5.665.000.000	
0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	Bekasi Timur	1	1.969.880.000	1	2.028.976.400	
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Persentase Fasilitas Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD	Persen (%)		100%	54.682.698.615	100%	56.323.179.573	
2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersusunnya Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan		24	22.555.052.000	24	23.231.703.560	
0001	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	Bekasi Timur	1	27.440.000,00	1	28.263.200,00	
0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Bekasi Timur	6	5.250.000.000	6	5.407.500.000	
0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	Bekasi Timur	210	2.821.612.000	210	2.906.260.360	
0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	Bekasi Timur	72	756.000.000	72	778.680.000	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Rencana Tahun 2026			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Ket
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	Bekasi Timur	12	12.000.000.000	12	12.360.000.000	
0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	Bekasi Timur	3	1.700.000.000	3	1.751.000.000	
2.05	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersusunnya Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan		10	16.615.007.500	10	17.113.457.725	
001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	Bekasi Timur	3	284.182.500	3	292.707.975	
0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	Bekasi Timur	3	925.000.000	3	952.750.000	
0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	Bekasi Timur	3	13.605.825.000	3	14.013.999.750	
0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	Bekasi Timur	7500	1.800.000.000	7500	1.854.000.000	
2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		12	2.089.068.000	12	2.151.740.040	
0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	Bekasi Timur	12	2.089.068.000	12	2.151.740.040	
2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Laporan		16	13.423.571.115	16	13.826.278.248	
0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	Bekasi Timur	1	1.373.571.115	1	1.414.778.248	
0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	Bekasi Timur	1	750.000.000	1	772.500.000	
0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	Bekasi Timur	3	10.000.000.000	3	10.300.000.000	
0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	Bekasi Timur	12	1.300.000.000	12	1.339.000.000	

Sekretariat DPRD Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai fungsi pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi:

1. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang meliputi Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Sekretaris DPRD Kota Bekasi dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Program dan Keuangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 100 Seri D), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota dalam bentuk Sekretariat DPRD. Struktur organisasi pada Sekretariat DPRD disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3. 4

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi

2.



Sumber : Data diolah Bagian Program dan Keuangan, 2025

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Bagian Umum membawahkan:
 1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- b. Bagian Program dan Keuangan
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

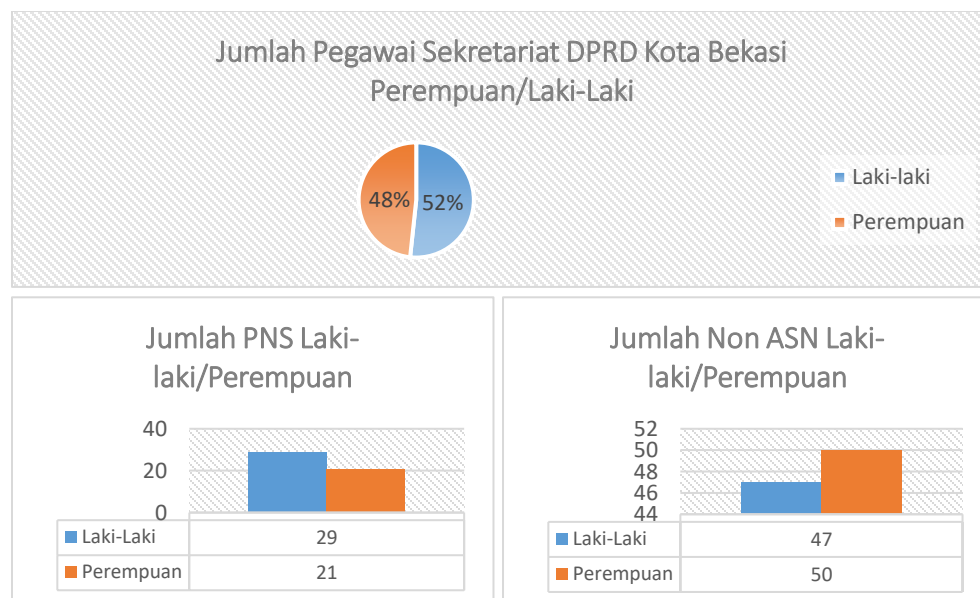
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan sub-koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi.

Salah satu indikator yang mendukung keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari ASN dan Non ASN.

Chart 3.1

Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi



Sumber : <https://siap.bekasikota.go.id/> (Data Diolah 2025)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung oleh 147 orang aparatur yang terdiri dari 29 orang laki-laki ASN dan 47 orang laki-laki Non ASN, 21 orang perempuan ASN dan 50 orang perempuan Non ASN seperti tampak pada infografis di atas,

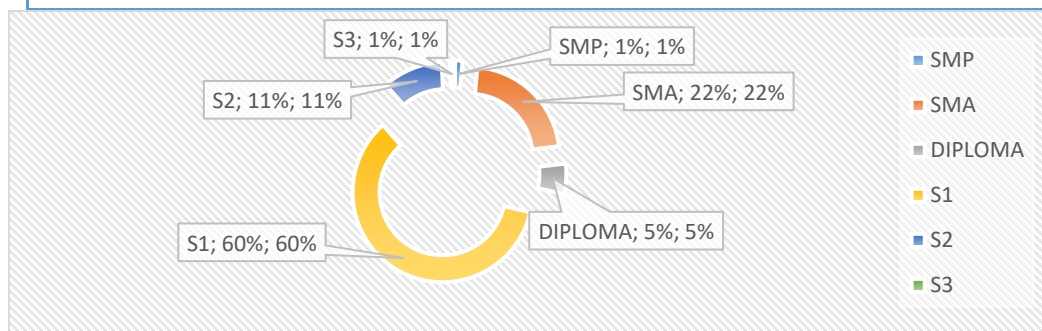
sehingga secara pengarustamaan gender Jumlah pegawai perempuan dan laki-laki pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi cukup seimbang. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 50 orang PNS dan 97 orang Non ASN.

Adapun dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1, 11% dengan tingkat pendidikan S2, sedangkan yang lainnya adalah D3/S2, SMA, dan SMP, seperti tampak pada Tabel

Chart 3. 2

Formasi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

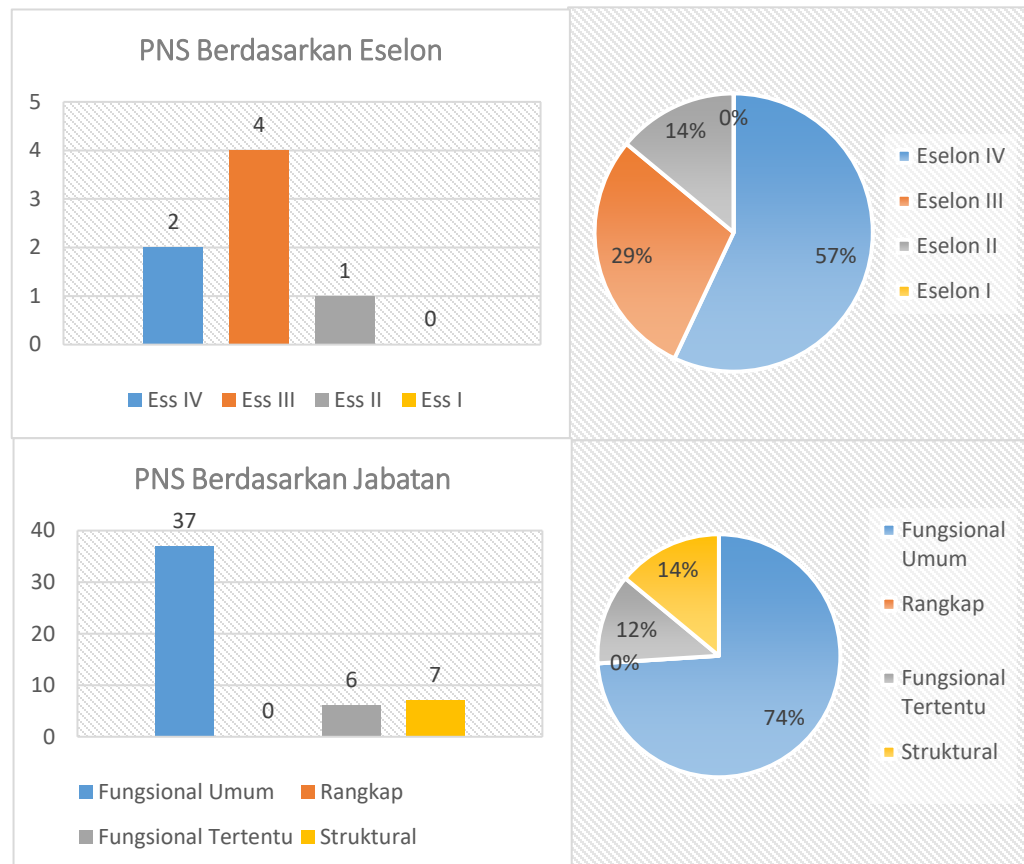
NO	STATUS	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1	DIPLOMA	SMA	SMP	
1	ASN	1	14	26	2	6	1	50
2	NON ASN	0	2	62	6	26	1	97
		1	16	88	8	32	2	147



Sumber : <https://siap.bekasikota.go.id/> (Data Diolah 2025)

Secara kuantitas pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian dibidang perencanaan, kehumasan, dan hukum. Untuk lebih jelasnya tampak pada infografis di bawah ini:

Chart 3. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Eselon



Sumber : <https://siap.bekasikota.go.id/> (Data Diolah 2025)

Jumlah Esselon II adalah 1 orang, Jumlah Esselon III adalah 4 orang, Adapun jumlah Eselon IV adalah 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 5 (lima) Eselon IV sebelumnya berubah menjadi jabatan fungsional tertentu. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif. Sekretariat DPRD Kota Bekasi juga memiliki Arsiparis sehingga total Fungsional tertentu adalah 6 orang, dan fungsional umum adalah 37 orang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI

Perumusan rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja yang bertujuan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan Peraturan program, kegiatan dan pagu indikatif RKPD sebagaimana ditetapkan dalam Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026

Adapun Rankhir Rencana Kerja Tahun 2026 terdapat perubahan dan penambahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan maupun anggaran sebagaimana berikut :

Tabel 4. 1

Rencana Kerja dan Pendanaan
 Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
	SEKRETARIAT DPRD					219.165.099.233	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				100%	111.816.658.562	
	Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persen (%)	98%	80.000.000	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Dokumen	7	80.000.000	
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bekasi Timur	Dokumen	3	40.000.000	
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bekasi Timur	Laporan	4	40.000.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	16.402.446.000	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	18	16.402.446.000	
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	Orang/bulan	2086	16.338.446.000	
0005	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	Laporan	2	40.000.000	
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bekasi Timur	Laporan	15	24.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Nilai	86.2	951.170.000	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	2	951.170.000	
0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bekasi Timur	Orang	52	379.170.000	
0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Timur	Orang	48	572.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	7.241.566.562	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	36	7.241.566.562	
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	Paket	1	150.000.000	
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	Paket	4	3.300.000.000	
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bekasi Timur	Paket	3	459.116.562	
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bekasi Timur	Dokumen	4	580.000.000	
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bekasi Timur	Laporan	12	1.752.450.000	
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Timur	Laporan	12	1.000.000.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	96,54	2.200.000.000	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan		Laporan	220	2.200.000.000	
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bekasi Timur	Unit	220	2.200.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	1.475.000.000	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK		Laporan	60	1.475.000.000	
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bekasi Timur	Laporan	12	25.000.000	
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bekasi Timur	Laporan	36	1.200.000.000	
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	Laporan	12	250.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	96,54	10.792.000.000	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara		Laporan	314	10.792.000.000	
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	Unit	33	510.000.000	
0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bekasi Timur	Unit	100	100.000.000	
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	Unit	177	832.000.000	
0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bekasi Timur	Unit	4	9.350.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	71.634.476.000	
2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD		Laporan	57	71.634.476.000	
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bekasi Timur	Orang/Bulan	650	70.614.476.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Bekasi Timur	Paket	6	770.000.000	
0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Bekasi Timur	Orang	50	250.000.000	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persen (%)	88	1.040.000.000	
2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD		Laporan	13	1.040.000.000	
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	1	40.000.000	
0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Bekasi Timur	Laporan	12	1.000.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				100%	107.348.440.671	
	Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N		Persen (%)	100%	20.638.181.000	
2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Laporan	6	20.638.181.000	
0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.450.000.000	
0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	Dokumen	1	6.682.250.000	
0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian PerundangUndangan	Bekasi Timur	Dokumen	1	4.492.831.000	
0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Bekasi Timur	Dokumen	1	5.122.010.000	
0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	Dokumen	1	391.090.000	
0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Bekasi Timur	Orang	10.000 orang	2.500.000.000	
	Outcome: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N		Tepat Waktu/Tidak Tepat	Tepat Waktu	6.000.000.000	
2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Laporan	6	6.000.000.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.500.000.000	
0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	
0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	
0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	
0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Bekasi Timur	Dokumen	1	500.000.000	
0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persen (%)	100%	26.027.561.056	
2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Laporan	51	26.027.561.056	
0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	
0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	
0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	
0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Bekasi Timur	Laporan	12	4.389.420.264	
0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.000.000.000	
0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Bekasi Timur	Dokumen	1	5.500.000.000	
0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Bekasi Timur	Dokumen	1	1.969.880.000	
	Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD		Persen (%)	100%	54.682.698.615	
2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD		Laporan	24	22.555.052.000	
0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	1	27.440.000,00	
0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	6	5.250.000.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bekasi Timur	Orang	210	2.821.612.000	
0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bekasi Timur	Orang	72	756.000.000	
0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bekasi Timur	Dokumen	12	12.000.000.000	
0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	3	1.700.000.000	
2.05	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Laporan	10	16.615.007.500	
001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Bekasi Timur	Laporan	3	284.182.500	
0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	Dokumen	3	925.000.000	
0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Bekasi Timur	Dokumen	3	13.605.825.000	
0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	Orang	7500	1.800.000.000	
2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Laporan	12	2.089.068.000	
0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Bekasi Timur	Laporan	12	2.089.068.000	
2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD		Laporan	16	13.423.571.115	
0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	1 Dokumen	1.373.571.115	
0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	Laporan	1	750.000.000	
0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Bekasi Timur	Dokumen	3	10.000.000.000	
0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bekasi Timur	Dokumen	12	1.300.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rankhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai Triwulan II Tahun 2025 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Proses penyusunan Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas *output* perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah.

Adapun kaidah pelaksanaan Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bagian, sub bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, agar melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026, diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan,

maka setiap komponen Sekretariat DPRD Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;

6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bagian;
 - b. Sekretaris DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Bagian melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA bagian periode sebelumnya;
 - d. Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyusun evaluasi RENJA berdasarkan hasil evaluasi bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;

Rencana tindak lanjut Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2026 akan melaksanakan:

1. Analisis pengelolaan program dan anggaran dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparasi.
2. Analisis dan evaluasi SDM dalam rangka penguatan kapasitas SDM.
3. Koordinasi dan harmonisasi antara legislatif dan eksekutif, serta *stakeholder* dalam pengoptimalisasian fungsi DPRD.
4. Pengembangan Kebijakan Berbasis Data dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

5. Monitoring dan evaluasi secara berjenjang, serta pengembangan sistem pelaporan yang efektif terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
6. Peningkatan Nilai AKIP dengan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rankhir Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2026. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan perbaikan

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 15 Agustus 2025
Sekretaris DPRD Kota Bekasi



Lia Erlani, A.P, M.Si
NIP. 19750606 199311 2 001